



► **DANA KEISTIMEWAAN**

Pandemi Bikin Serapan Danais Tersendat

Jumali, Abdul Hamid Razak,
& Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

BANTUL—Pandemi Covid-19 membuat serapan Dana Keistimewaan (Danais DIY) jadi tersendat.

Serapan Danais di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Bantul baru mencapai sekitar 20% dari total Rp2 miliar hingga akhir April 2021. Kepala DPTR Bantul, Suprianto, mengatakan alokasi danais untuk instansi yang dia pimpin tahun ini sebesar Rp2 miliar untuk urusan pertanahan dan urusan Tata Ruang. Dari jumlah tersebut yang sudah digunakan baru untuk urusan pertanahan yakni pematokan lahan *Sultan Grond* (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD). “Sedangkan untuk tata ruang, masih dalam tahap lelang. Untuk pertanahan serapan baru sekitar 20 persen,” katanya, Sabtu (1/5).

Selain baru terserap 20%, Suprianto mengaku anggaran danais juga terpangkas cukup banyak. Kendati tidak merinci besaran Danais 2020, dia memastikan karena masih dalam situasi pandemi Covid, anggaran tahun ini dipangkas untuk penanganan Covid-19. “Untuk mengejar serapan, kami hanya bisa menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran yang ada. Termasuk penyertifikatan tanah dan pembelian patok,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Kunto Riyadi menjelaskan Kabupaten Sleman pada tahun ini memperoleh Danais total sebesar Rp248,2 miliar. Jumlah Danais tersebut didistribusikan untuk berbagai urusan, mulai kelembagaan, kebudayaan, tata ruang, maupun pertanahan.

► Halaman 10

Pandemi Bikin...

Dari pagu anggaran sebesar Rp248,2 miliar tersebut, Sleman baru menerima Danais tahap pertama sebesar Rp2,45 miliar. "Dari jumlah yang diterima pada triwulan pertama ini baru terserap sebesar Rp1,35 miliar atau 55,39 persen," jelasnya.

Dijelaskan Kunto, ada sejumlah kendala yang dihadapi terkait dengan belum maksimalnya penyerapan anggaran Danais pada triwulan pertama. Dia mencontohkan untuk urusan pertanahan tahun ini diagendakan kegiatan seperti pendaftaran ukur peta bidang tanah desa di BPN hingga pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa.

Namun pelaksanaan di lapangan, kata Kunto, terdapat kendala di mana Pemkab masih menunggu data-data penunjang dari BPN. Hal ini terjadi karena ada permasalahan pada bidang tanah seperti keluasan di sertifikat yang tidak sama dengan yang ada di lokasi, batas tanah desa tumpang tindih dengan tanah milik warga dan lainnya.

"Akibatnya dari total anggaran Rp4,83 miliar pada tahap pertama menerima Rp770 juta. Serapan anggarannya baru mencapai Rp364 juta atau 47,27 persen. Untuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kami akan koordinasi dengan," jelasnya.

Kunto mengatakan serapan Danais untuk urusan kebudayaan rendah meskipun untuk urusan kebudayaan banyak kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan pertama. Penyebabnya, kegiatan yang digelar belum sepenuhnya selesai sehingga kegiatan dilanjutkan pada triwulan kedua. "Pada triwulan kedua ini, seluruh kegiatan dan program yang sudah dicanangkan

akan dipercepat pelaksanaannya pada awal triwulan kedua," kata Kunto.

Kepala Subbid Pengendalian, Bappeda Sleman, Christiana Rini Puspita, menambahkan untuk urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan mendapatkan total anggaran Rp12 miliar. Tahap pertama, pagu anggaran tahap 1 sebesar Rp1,2 miliar atau 10% dari pagu anggaran. "Adapun capaian kinerja tahap 1 sudah mencapai 80 persen dari target tahap 1. Sementara realisasi anggaran untuk tahap 1 sebesar Rp960 juta. Ini capaian dari sesi tahap bukan per tahun," katanya.

Perencanaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja menyebut hingga 30 April serapan danais yang dialokasikan ke sejumlah lembaga telah mencapai 79,9% atau berjumlah Rp2,1 miliar dari Rp2,7 miliar yang digelontorkan Pemda DIY. Serapan itu diklaim telah sesuai dengan dokumen rencana penggunaan.

"Di Kota Jogja relatif sesuai dengan dokumen rencana penggunaan dan awal Mei sudah proses untuk pengajuan tahap kedua," kata Kasubdit Belanja Daerah BPKAD Kota Jogja, Dwi Lestari Setyaningsih.

Dwi menjelaskan pada tahun ini Pemkot Jogja mendapatkan alokasi danais senilai Rp56,2 miliar lebih yang diperuntukkan bagi urusan kebudayaan, kelembagaan, tata ruang dan juga urusan pertanahan sesuai dengan UU Keistimewaan.

Adapun alokasi untuk tiap-tiap urusan itu yakni Rp24,4 miliar diperuntukkan bagi urusan kebudayaan, Rp300 juta untuk

kelembagaan, Rp897 juta bagi pertanahan, dan tata ruang senilai Rp30,6 miliar. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu Rp67,9 miliar.

Proyek Infrastruktur

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji, mengakui serapan danais termin pertama masih minim.

Baskara Aji mengatakan paling berpengaruh terhadap serapan danais adalah pembangunan infrastruktur yang dikelola Pemda DIY dan pemerintah kabupaten dan kota yang belum selesai semuanya.

Ia berharap April-Mei ini semua pembayaran pembangunan infrastruktur yang menggunakan danais bisa selesai. "Misalnya pembangunan jembatan Rp48 miliar sebetulnya sudah proses. Lelang sudah selesai tapi pencairannya belum," ujar Baskara Aji.

Sebelumnya, Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho mengaku waswas danais termin kedua tidak dicairkan oleh Pemerintah Pusat karena transferan termin pertama belum mencapai target.

Dia mengatakan Pemda DIY mendapat transferan danais termin pertama sebesar Rp198 miliar atau 15% dari total danais sebesar Rp1,32 triliun tahun ini. Dari danais termin pertama, Pemda DIY seharusnya bisa menyerap sampai 80% atau sampai Rp148 miliar. Sementara yang baru terserap sampai April ini baru sekitar Rp118 miliar, sehingga masih kurang Rp40 miliar untuk serapannya.

"Kami belum bisa mendapatkan transferan yang kedua karena salah satu syaratnya belum terpenuhi," kata Aris. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005